

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Konsep Kolaborasi governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ini dihadirkan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi juga dapat dipahami sebagai tindakan koordinasi yang dilakukan secara langsung sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk kesepakatan pembuatan dalam keputusan bersama untuk menggapai sesuatu ataupun terhadap penanggulangan masalah secara bersama-sama.

- 1 Nelvi Rahmadani dalam penelitiannya yang berjudul.” Collaborative governance dalam penanggulangan banjir dikota Dumai Riau studi kasus pada hambatan dan pelaksanaan banjir dikota dumai riau Kecamatan tampan.” Istilah *collaborative governance* merupakan sebuah konsep proses penyelenggaraan kebijakan publik yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Mengacu pada nilai dari *collaborative* /kolaborasi Secara prinsip, ada nilai dasar yang melekat pada *collaborative governance*.¹¹
- 2 Rahmi Mulyasari Nandi Haerudin dan Sandi erfani dalam penelitiannya yang berjudul “Edukasi Mitigasi bencana banjir melalui edukasi siaga banjir” menjelaskan bahwa kondisi daerah yang rawan banjir dan perlunya edukasi terkait mitigasi bencana. Tujuan yang ingin dicapai berbentuk sosialisasi edukasi mitigasi bencana banjir.¹²

¹¹ Nelvi Rahmadani, “*Collaborative governance dalam penanggulangan banjir dumai riau.*”(studi kasus penanggulangan banjir kecamatan tampan)” (skripsi, UIN suska riau, 2023).Hal. 124

¹² Rahmi mulayasari Nandi Haerudin dan Sandierfani,2024, “Edukasi Mitigasi bencana banjir melalui sosialisasi edukasi”, *Jurnal pendidikan ilmu sosial*, Vol 8 No 1 Hlm 4

Collaborative governance mengacu kepada tata kelola pemerintah dimana melibatkan partisipasi langsung dari pemangku maupun *stakeholder* kepentingan di luar pemerintah atau negara, menuju pertimbangan dan kemufakatan dalam memetik kesepakatan bersama, mengembangkan atau menerapkan kebijakan dan program publik.¹³

Bagan 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Judul Penelitian	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Penelitian Sekarang
Nelvi Rahmadani (2023)	Judul Skripsi: <i>Colaborative Governance</i> dalam penanggulangan banjir di kota dumai riau. Penelitian diteliti adalah masyarakat setempat dan kelurahan serta hambatan pelaksanaan pencegahan banjir di kota riau.	Neta Afriyani (2024)	Judul Skripsi: <i>Collaborative governance</i> dalam <i>Flood Management</i> (Studi Kasus antara Kelurahan Sekar Jaya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024. Peneliti meneliti adalah BPBD OKU, Kelurahan Sekar Jaya, Tokoh masyarakat, Petugas kebersihan PD Pasar Restu Sriwijaya. sebagai <i>file project</i> dalam <i>Collaborative</i> Pemerintah.
Rahmi Mulyasari Nandi Haerudin dan Sandri Erfani (2024)	Menganalisi pencegahan banjir dan Memberikan edukasi Bencana banjir kepada masyarakat yang bermukim di wilayah aliran sungai.	Neta Afriyani (2024)	Progres kemajuan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan permasalahan dan tujuan dari pihak collaborative governance kelurahan sekar jaya dan BPBD

Sumber. Nelvi Rahmadani."COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI." Skripsi, Universitas uin suska riau. 2023.

¹³ Ansell. C. & Gash. A, *Collaborative governance in theory and practice*, Journal of public administration research and theory, 2008.

2.2 Collaborative Governance

Kolaborasi adalah proses kerja sama antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Istilah ini berasal dari kata Latin "co-" yang berarti "dengan" dan "laborare" yang berarti "bekerja" atau "berusaha". Kolaborasi melibatkan kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesamaan, dan tanggung jawab. Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah dan Masyarakat, Pemerintah dan Swasta, Pemerintah dan Pemerintah. Semua pihak yang terlibat memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, dan keinginan untuk berproses bersama. Kolaborasi memerlukan perencanaan bersama, pembagian sumber daya, dan tanggung jawab bersama dalam implementasi dan evaluasi program-program untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama kolaborasi adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui kerja sama, memecahkan masalah yang kompleks, menciptakan sesuatu yang baru, dan menemukan solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi. Kolaborasi juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, kapasitas, dan efisiensi, serta membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah dan peluang.

Collaborative governance adalah sebuah proses dimana aktornya saling terlibat untuk melakukan kerjasama yang didasarkan pada keberadaan "tata kelola" multi pemangku kepentingan yang lain seperti sektor swasta dan masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Kolaborasi akan berhasil jika stakeholders merasa memiliki ketergantungan dengan yang lainnya, dan adanya upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari para stakeholders.

Kolaborasi melibatkan beberapa tahapan, termasuk penentuan permasalahan (*problem setting*), penentuan arah (*direction setting*), dan implementasi melalui evaluasi program-program. Proses kolaborasi juga melibatkan interaksi berkesinambungan di antara pihak-pihak yang terlibat, memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah, dan menemukan solusi dari perbedaan tersebut.

Kolaborasi dapat memberikan nilai tambah dengan mengurangi biaya dan alur kerja, meningkatkan kecepatan, dan membuat proses kerja lebih ramah lingkungan. Dalam konteks bisnis, kolaborasi dapat diterapkan untuk mewujudkan karyawan yang mobile, menghemat sumber daya, dan meningkatkan kecepatan operasional. *collaborative governance* adalah suatu proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan (lembaga publik), institusi swasta maupun masyarakat sipil, dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.¹⁴

Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai proses partisipasi sekelompok orang, dan atau organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, dengan menyelesaikan visi secara bersama, dengan memberikan hasil positif bagi konsumennya, dan membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah dan peluang¹⁵. Kolaborasi akan melibatkan berbagi sumber daya dan tanggung jawab yang bersama-sama merencanakan, melaksanakan dan

¹⁴ Astuti, A. F., & Sudarsono, H. (2018). *Analisis Penanggulangan Banjir Sungai Kanci*. Jurnal Konstruksi, Vii(3), 163–170.

¹⁵<https://publik.untag-sby.ac.id/web/beritadetail/collaborative-governance-sebuah-paradigma.html>

mengevaluasi program-program untuk mencapai tujuan bersama, dimana seluruh anggota kolaborasi harus bersedia untuk berbagi visi, misi, kekuatan, sumber daya dan tujuan.¹⁶ Penerapan kolaborasi dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari dapat memberikan nilai tambah dengan mengurangi biaya dan alur kerja secara signifikan.

Definisi Kolaborasi merupakan proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, khalayak yang mereka layani, dan membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah dan peluang.¹⁷ Proses kolaboratif merupakan suatu kegiatan partisipasi dari para pemangku kepentingan berupa diskusi atau dialog yang menghasilkan suatu keputusan hasil konsensus yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan itu sendiri.

Istilah tata kelola *kolaboratif* atau *collaborative governance* merupakan sebuah konsep terbaru yang sudah banyak dipakai pada proses penyelenggaraan kebijakan publik. Mengacu pada nilai dari *collaborative* /kolaborasi berbeda dengan nilai pada network (jaringan) dan partnership (kemitraan). Secara prinsip, ada nilai dasar yang melekat pada *collaborative governance*.¹⁸

¹⁶ Hafizhan, A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Banjir Di Kota Bekasi*. Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁷ Zulaeha, M., Ariany, L., Dwifama, A. H., Falmelia, R. A., & Ridhani, M. S. (2022). *Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Benana Banjir Di Kalimantan Selatan*. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, 7(3), 150–159

¹⁸ Dewi, N. L. Y. (2019). *Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(2), Hal 200.

Ansell dan Gash meneliti proses kolaborasi sebagai sebuah rangkaian yang mencakup dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan, Komitmen terhadap proses berbagi pemahaman dan hasil kolaborasi Pemerintah.¹⁹

Face To Face Dialog dialog atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut untuk membahas kepentingan bersama. *face to face* (dialog tatap muka) dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang sama tentang tindakan yang akan di ambil.²⁰

Trust Building proses kolaborasi membangun kepercayaan diantara para pihak yang mempunyai niatan yang sama untuk mengambil kebijakan merupakan Langkah terbaik yang harus dilakukan. Proses pra bencana membangun kepercayaan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan antara Kelurahan Sekar Jaya dan BPBD Ogan Komering Ulu, terkait penanganan banjir dan menghimbau masyarakat khususnya kepada pedagang pasar untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar yang di bantu oleh PD Pasar Sekar Jaya.

Comtment To Proses Kolaborasi dapat sepenuhnya terjadi apabila terdapat komitmen dari setiap pemangku kepentingan. Komitmen bergantung pada kepercayaan bahwa sesama pemangku stakeholders kepentingan harus saling menghormati setiap pandangan dan menghargai kepentingan karena proses

¹⁹ Rulinawaty, "Implementation Of Collaborative Governance In Flood Management In The Greater Bandung Area".2022

²⁰ Bima Ade Prayoga, "Collaborative Governance dalam Penanggulangan banjir di Desa Tanjung sari, Kabupaten Cikarang Utara. 2021

kolaborasi sebelum dilaksanakannya sebuah komitmen harus mampu meyakinkan dirinya terhadap integritas dari prosedur musyawarah dan negosiasi.

(*Shared Understanding*) tahapan terkait pemahaman yang sama dan jelas tentang suatu tujuan dan proses yang sama dalam *Collaborative* dan Mencapai pemahaman dan visi bersama mengenai masalah dan tujuan. Komitmen merupakan modal utama dalam kolaborasi sehingga penolakan-penolakan dari masyarakat dapat diminimalisir. Ukuran keberhasilan sebuah program adalah apakah dapat berpengaruh secara positif pada masyarakat. Demikian tahap-tahap *collaborative* melalui aspek tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana.²¹

2.3 Collaborative Pemerintah dan Pemerintah

Kolaborasi pemerintah dan pemerintah, atau yang sering disebut sebagai *collaborative governance*, merujuk pada proses di mana satu atau lebih lembaga publik bekerja sama dengan pihak lain, termasuk sektor swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang bersifat formal dan berorientasi pada konsensus. Konsep ini bertujuan untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai jika hanya mengandalkan satu pihak saja.

Kolaborasi Pemerintah dan Pemerintah merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, dan keseimbangan peran serta adanya saling kontrol yang dilakukan oleh tiga komponen pemerintah, rakyat, dan swasta/bisnis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan daerah lain, baik dalam provinsi yang sama maupun antar provinsi.

²¹ Astuti Retno, Warsono & Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. 2020

Kerja sama ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. pertukaran tenaga kesehatan dan sukarelawan untuk penanggulangan bencana merupakan bentuk kolaborasi Pemerintah dan Pemerintah dalam pencegahan banjir antara Kelurahan Sekar Jaya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemerintahan yang baik dapat diciptakan melalui reformasi yang holistik dan partisipatif, serta diiringi oleh transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.²²

Penerapan Kolaborasi Pemerintah yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2020 ini menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana untuk periode 2020-2044.²³ Pentingnya peraturan ini Penguatan Peraturan dengan cara Menekankan pentingnya penguatan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana, dan Kebijakan dan Strategi memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, serta kebijakan dan strategi yang harus diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah.²⁴

Kolaborasi pemerintah bisa terjadi kepada masyarakat dalam pencegahan banjir Kelurahan Sekar Jaya, Menurut Ansell dan Gash kolaborasi pemerintahan adalah suatu pengaturan di mana lembaga publik terlibat langsung dengan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan Tujuan

²² Yoseph Molla, *"Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijung di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat,*

²³ Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2020

²⁴ Perda No. 4 Tahun 2019 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

utama dari kolaborasi ini adalah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik serta mengelola program publik.²⁵

Dasar peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mencakup berbagai regulasi yang mengatur tindakan pemerintah dalam menghadapi bencana tersebut.²⁶ Dasar hukum dan kebijakan peraturan daerah (Perda) yang berlaku:

1. Perda No. 4 Tahun 2019

Mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU, yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana.

2. Perda No. 9 Tahun 2023

Berfokus pada penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Upaya Penanggulangan Aktivasi Posko Penanggulangan Bencana berdiri di setiap kecamatan untuk merespons situasi darurat. Kemudian Penyebaran Personel BPBD menempatkan personel di daerah terdampak untuk membantu proses pembersihan dan evakuasi. dan Pengungsian disini Pemerintah menyediakan tempat pengungsian bagi korban banjir dengan fasilitas dapur umum

Perkembangan teknologi dan informasi yang merupakan acuan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Dalam situasi darurat, kolaborasi antara

²⁵ Ansell. C. & Gash. A, *Collaborative governance in theory and practice*, Journal of public administration research and theory, 2007.

²⁶ Perda No. 9 Tahun 2023 Penyelenggaraan Bencana Daerah

pemerintah, organisasi masyarakat, dan relawan sangat penting untuk melakukan evakuasi warga yang terdampak. Tim gabungan dapat bekerja lebih efektif dalam mengevakuasi korban ke lokasi yang aman dan menyediakan bantuan logistik.²⁷

Kolaborasi Pemerintah biasa juga terjadi kepada pihak Masyarakat. Kolaborasi memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat. Munculnya perspektif *good governance* diartikan sebagai salah satu pandangan baru berdasarkan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Kualitas kebijakan publik dan pelayanan publik semakin lebih baik, dan pemerintah akan semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.²⁸

Ansell dan *Gash* dalam *Islamy* (2018) mengatakan bahwa Kolaborasi Pemerintah adalah suatu model yang menyatukan pemangku kepentingan umum, dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat konsensus. pandangan ini dapat dilihat bahwa pada era demokrasi yang berjalan saat ini, proses dalam pembuatan sebuah keputusan guna menyelesaikan suatu masalah publik tidak dapat dilakukan oleh satu pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Peran serta ataupun keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, baik itu Pemerintah, pihak Swasta, maupun masyarakat adalah penting untuk dicermati dengan baik, sebab masalah publik dan pelaksanaan suatu kebijakan dapat

²⁷ Astuti Retno, Warsono & Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. 2020

²⁸ <https://news.detik.com/kolom/d-5591992/collaborative-governance-untuk-keselamatan-wisata>

memiliki implikasi yang luas serta penyelesaiannya bisa menjadi tidak optimal seandainya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja.

Tata kelola yang baik, merupakan konsep penting dalam pengelolaan pemerintahan dan organisasi yang bertujuan menciptakan lingkungan yang efisien, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dari *Governance* yaitu

- 1 Akuntabilitas (*Accountability*): Tanggung jawab pemimpin publik untuk mengelola kepentingan masyarakat dengan transparansi dan kejelasan dalam fungsi dan struktur organisasi.
- 2 Transparansi (*Transparency*): Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan informasi yang relevan harus dapat diakses oleh publik.
- 3 Responsivitas (*Responsiveness*): Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dan harapan masyarakat dengan cepat.
- 4 Orientasi Konsensus (*Consensus Orientation*): Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan perbedaan kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama.

Penerapan prinsip *Governance* sangat penting untuk menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan perkembangan berkelanjutan dalam suatu negara atau organisasi. membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi aktif warga negara dalam proses pemerintahan Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. pengambilan keputusan

terhadap kebijakan yang dilakukan secara musyawarah antara pihak stakeholder Kelurahan Sekar Jaya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu dan PD Pasar Sekar Jaya dalam pengambilan keputusan flood management guna menghimbau seluruh masyarakat terutama pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar pasar.

Pihak Kelurahan Sekar Jaya memberikan sebuah kesepakatan terhadap PD Pasar Restu untuk dan menghimbau masyarakat senantiasa menjaga lingkungan dan kebersihan Pasar dengan memberikan sebuah kesepakatan antara pihak kelurahan, pedagang pasar dan PD Pasar untuk memberikan uang iuran setiap harinya kepada petugas PD Pasar yang membersihkan sampah pedagang sehingga pedagang pasar memberikan sejumlah uang iuran yang sudah menjadi kesepakatan oleh pihak kelurahan dan PD Pasar Restu.²⁹

Berdasarkan hasil masalah, penyebab banjir tersebut akibat luapan sungai Ogan. Salah satu penyebabnya kebiasaan warga membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat aliran anak sungai dan saluran pembuangan air. Selain itu, pemanfaatan dan tata kelola hutan yang kurang baik oleh pihak terkait untuk dijadikan lahan perkebunan dan industri turut menjadi penyumbang bencana alam kerap terjadi saat musim hujan. Pemerintah aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan dan menghentikan praktik penebangan hutan yang dapat memperburuk kondisi banjir mengingat bencana adalah urusan bersama.³⁰

²⁹ <https://www.antaranews.com/berita/4118394/og-an-komering-ulu-diterjang-banjir-bandang-tinggi-air-capai-1-2-meter>

³⁰ Yoseph Molla, “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat*, Tesis, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, 2021.

Pihak perlu meningkatkan kesadaran penanggulangan bencana dan terlibat dalam pengurangan resiko bencana. peran para pemangku kepentingan dalam berbagi pemahaman dimulai dari pelaksanaan sosialisasi pada setiap bidang teknis dinas kepada masyarakat dan menyampaikan informasi dan pengetahuan agar masyarakat mempunyai kepedulian dalam pengurangan resiko bencana serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana.³¹

Bencana banjir hampir setiap musim hujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi keja dan bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan, dan sebagainya), pembuangan sampah kedalam sungai, pembangunan permukiman di daerah banjir dan sebagainya.³²

Pengetahuan diantara sesama pemangku kepentingan dapat membuat para aktor kolaborasi dapat belajar bersama, sehingga dalam proses belajar tersebut dapat menemukan strategistrategi untuk mengurangi resiko bencana banjir. Sebagai negara yang mengalami 2 (dua) musim yaitu musim panas dan musim penghujan maka banjir tidak menjadi sesuatu yang mengherankan lagi bagi masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia juga merupakan negara yang secara geografis beriklim tropis dengan kelembapan yang cukup tinggi hampir seluruh wilayah di Indonesia maka bencana seperti banjir menjadi sesuatu yang akrab

³¹ <https://regional.kompas.com/read/2024/05/08/164824878/bpbd-oku-evakuasi-korban-banjir-di-4-kecamatan>

³² Arrozaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance*. Kebijakan Dan Manajemen Publik,,1–13.

dirasakan oleh penduduknya. banjir yang tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka bencana tersebut akan memunculkan banyak kerugian yang besar secara ekonomi maupun infrastruktur masyarakat akibat banjir baik secara individu ataupun sosial baik dari material maupun non material masyarakat.

2.4 Flood Management

Bencana adalah suatu kejadian alam yang dapat membahayakan nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya karena perbuatan manusia atau alam. Rentetan kejadian yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena sebab-sebab alam atau ulah manusia.³³

Manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan. penanganan bencana peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian.

Banjir adalah fenomena alam yang terjadi ketika air meluap ke daratan yang biasanya kering, sering kali disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, atau masalah sampah yang menghalangi aliran air. Berikut adalah penjelasan lebih

³³ Pratiwi, Z. N., & Santosa, P. B. (2021). *Pemodelan Banjir dan Visualisasi Genangan Banjir untuk Mitigasi Bencana* di Kali Kasin Kelurahan Bareng Kota Malang. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering (JGISE)*, 4(1).
<https://journal.ugm.ac.id/jgise/article/view/56525>

rinci mengenai konsep banjir, penyebab, dampak, dan langkah-langkah pencegahan.³⁴

Banjir didefinisikan sebagai keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah besar. Ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau bertahap, tergantung pada faktor penyebabnya. Adapun penyebab terjadinya banjir meliputi:

- 1 Curah hujan yang tinggi dan keberlanjutan menyebabkan luapan air sungai yang menaik dalam waktu singkat.
- 2 Sampah yang di hasilkan dari masyarakat maupun pedagang yang di buang pada aliran sungai sehingga menyebabkan aliran sungai tersumbat.
- 3 Wilayah dengan sistem aliran sungai yang buruk sehingga pada saat air menaik aliran sungai tidak berfungsi dengan baik.

Banjir merupakan bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset mereka.³⁵

Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya beradaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrem ataupun yang di sebabkan oleh sampah masyarakat.

Adapun dampak terjadinya banjir yakni:

- 1 Kerugian Ekonomi yang berskala besar yang mengakibatkan kerusakan rumah maupun aset warga yang terjadi karena banjir.

³⁴ M. R. Amri, G. Yulianti, R. Yunus, and S. Wiguna, (2016). "*Risiko Bencana Indonesia (RBI)*". BNPB Indonesia.

³⁵ Astuti, Retno S., Warsono, H., Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP, Universitas Diponogoro Press.

- 2 Kerusakan Properti yang parah menyebabkan infrastruktur rumah maupun bisnis menjadi hancur disebabkan banjir.
- 3 Korban jiwa dan luka-luka yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang yang kita cintai disebabkan terjadinya banjir.

Tindakan pencegahan banjir dan kesiapsiagaan dapat dilakukan oleh stakeholder pemerintahan dan antisipasi masyarakat yang bertugas menghimbau masyarakat yang bermukim di tepian aliran sungai.³⁶ Beberapa langkah untuk menerapkan *Flood management* meliputi:

- 1 Sistem peringatan dini dan evakuasi yang aman di lakukan para instansi pemerintahan baik itu dari Kelurahan Sekar Jaya.
- 2 Pemantauan cuaca dapat kita himbaukan kepada masyarakat yang bermukim disekitaran aliran sungai yang sering terjadinya banjir.
- 3 Infrastruktur banjir yang dilakukan adanya pembangunan tanggul saluran air sungai yang aman.
- 4 Penyuluhan publik memberikan edukasi kepada masyarakat tentang persiapan dan kesiagapan terjadinya banjir.

manajemen banjir (*flood management*) merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mengelola resiko banjir. meliputi beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk menghadapi dan mengurangi dampak banjir.³⁷

Tahapan-tahapan ini biasanya dirinci sebagai berikut:

- 1 *Prevention* penangan Tahap ini melibatakan kegiatan yang melibatkan fisik dan Non-fisik untuk mencegah timbulnya banjir. Contoh dari

³⁶ *Ibid Hal 147*

³⁷ Saputra, N. G., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). *Strategi penanggulangan bencana banjir kabupaten karawang di desa karangligar sebagai desa tangguh bencana*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 62-76

kegiatan fisik meliputi pembangunan infrastruktur di dataran rendah dalam pengendalian banjir terhadap aliran sungai, contoh kegiatan Non-fisik posisi dan penataan lahan di sekitar aliran sungai yang sering terkena banjir.

- 2 *Response* Tahap ini melibatkan tindakan yang dilakukan saat terjadinya banjir seperti penyebaran informasi dan menghimbau terkait pemberitahuan perkiraan banjir, tanggap darurat, bantuan peralatan evakuasi banjir, dan perlawanan banjir.
- 3 *Recovery* / Pemulihan Tahap ini berfokus pada pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat melalui bantuan kebutuhan hidup, dan perbaikan sarana dan prasarana.

Manajemen banjir mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana bencana banjir dapat dikelola secara efektif melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Manajemen banjir adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pencegahan, dan respons terhadap bencana banjir untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. manajemen banjir sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Manajemen banjir didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang terencana dan terpadu untuk mengelola risiko banjir, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-banjir. melibatkan perencanaan dan pengaturan yang bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat banjir serta melindungi masyarakat dan lingkungan.³⁸

³⁸ Rahmat, H. K., Syarifah, H., Kurniadi, A., Putra, R. M., & Wahyuni, S. W. (2021). Implementasi Kepemimpinan Strategis Guna Menghadapi Ancaman Bencana Banjir Dan Tsunami Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen Bencana*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.33172/Jmb.V7i1.627>

Memahami dan menerapkan tahapan-tahapan tersebut secara efektif, pemerintah dan masyarakat dapat lebih siap menghadapi ancaman banjir serta meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Penelitian dan analisis yang mendalam tentang penyebab serta dampak banjir juga diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Sekar Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemerintahan dapat untuk mengurangi risiko dan dampak banjir yang merugikan banyak masyarakat dan lingkungan sekitar.³⁹

Proses pencegahan banjir yang melibatkan tindakan seperti pembangunan bendungan, pengaturan aliran sungai, dan penanaman vegetasi untuk mengurangi aliran air. Termasuk perencanaan tata ruang yang baik, penggunaan teknologi untuk memprediksi banjir, dan pengembangan sistem peringatan dini. Menyusun rencana darurat dan pelatihan bagi masyarakat untuk menghadapi situasi banjir.

Flood management adalah upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk mengurangi dampak banjir, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan melindungi lingkungan. Khususnya masyarakat RS. Sriwijaya selalu dihimbau untuk tidak membuang sampah di aliran sungai sekitaran Pasar Restu Sriwijaya.

Manajemen banjir, terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko dan dampak banjir. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan:

1. Pembangunan infrastruktur

Membangun Bendungan dan waduk untuk menampung hujan dan mengarah aliran sungai agar tidak tersumbat.

³⁹ Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/Jim.V6i1.2022.161-174>

Membangun tanggul dan memperbesar ukuran tanggul di sepanjang sungai atau daerah rawan banjir untuk mencegah air meluap yang disebabkan faktor alam maupun faktor manusia.

Menjaga dalam mencegah banjir susulan dalam aspek infrastruktur.

2. Pengelolaan lahan

Pemukiman warga yang berhadapan langsung dengan aliran sungai khususnya RS. Sriwijaya untuk mengatur dalam penggunaan lahan tanah berkelanjutan untuk menghindari pembangunan di wilayah rawan banjir khususnya di wilayah RS. Sriwijaya yang berdekatan dengan pasar unit sriwijaya.

3. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat tentang kewaspadaan saat resiko banjir dengan cara mempersiapkan diri dan selalu mengantisipasi saat terjadinya banjir.

Pentingnya kesadaran masyarakat RS. Sriwijaya khususnya oknum yang suka sekali membuang sampah di aliran sungai bisa mengakibatkan dampak yang fatal bahkan kerusakan infrastruktur yang terjadi di wilayah pemukiman warga yang berada di pingiran aliran sungai.⁴⁰

Lingkungan yang selalu dijaga kebersihannya akan terhindar dari bencana banjir, Membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam penanggulangan bencana, serta mendorong gotong royong dalam menghadapi situasi darurat. manajemen banjir diharapkan dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, melindungi

⁴⁰ Novrianto, Efri. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish. 2019

lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.⁴¹

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dalam skripsi merupakan suatu dasar pemikiran yang mengintegrasikan teori, dan fakta kajian pustaka untuk membangun alur logika dalam penelitian. Ini berfungsi sebagai panduan yang membantu penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah, termasuk skripsi, tesis, atau disertasi. Kerangka berpikir sering kali disajikan dalam bentuk diagram yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan variabel-variabel penelitian. alat penting untuk membangun hipotesis dan memberikan penjelasan teoritis mengenai fenomena yang diteliti. Sementara itu, Suriasoemantri mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan untuk memaparkan menyusun semua gejala yang ada di dalam suatu penelitian.⁴²

Sugiyono juga berpendapat bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang digunakan sebagai landasan teori yang terkait dengan faktor-faktor dalam penelitian. Menurutnya, suatu penelitian membutuhkan kerangka

⁴¹ <https://www.liputan6.com/hot/read/5197257/10-cara-menanggulangi-banjir-membuat-bendungan-dan-tingkatkan-sistem-drainase>

⁴² <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202272/pengertian-kerangka-pemikiran-cara-membuat-beserta-contohnya>

berpikir agar bisa menjelaskan secara teoritis, dan dapat menjelaskan alasan adanya hubungan antara variabel.⁴³

Kerangka pikir yang penulis uraikan sudah sesuai permasalahan yang terjadi diakibatkan banjir, menjadi *colaborative* pemerintahan dalam *flood management* Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menguraikan Kerangka Pikir menjadi satu substansi permasalahan dalam *flood management* penentuan permasalahan menjadi faktor utama dasar permasalahan terjadi dikelurahan sekar jaya yang mengakibatkan banjir disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia / oknum yang tidak memperdulikan kebersihan lingkungan area aliran sugai, membuang sampah mengakibatkan aliran sungai meluap saat cuarah hujan meningkat. Mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat bermukim aliran sungai Kelurahan Sekar Jaya. Pentingnya penentuan tujuan pada aspek pemasalahan yang terjadi Kelurahan Sekar Jaya mengambil sebuah keputusan dalam *flood management* mengurangi insiden bencana banjir yang mengakibatkan terancamnya keselamatan nyawa masyarakat Sriwijaya.

Kondisi Awal tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berebeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan dalam relasi yang dijalankan. Penentuan masalah / *Problem Setting* merupakan langkah penting dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi serta dimana masalah tersebut ditangani secara jelas untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi kepentingan bersama bukan kepentingan yang tidak jelas untuk perencanaan yang akan mendatang.

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Penentuan tujuan / *Direction Setting* merupakan tahapan yang penting dalam collaborasi mencegah kebingungan mendorong komitmen untuk menentukan arah tujuan dan menetapkan aturan dasar tujuan yang jelas mencapai hasil yang diinginkan. Penentuan tujuan memiliki tahapan dalam menyusun agenda untuk memastikan langkah-langkah yang diambil mencakup penetapan topik, lokasi, dan waktu, menyatukan informasi dari berbagai sumber Implementasi Kebijakan suatu langkah yang penting dalam memastikan sebuah keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah implementasikan secara baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Proses implementasi kebijakan memiliki kendala seperti kooordinasi antar stakeholders kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan.⁴⁴

Melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta pihak PD Pasar Restu Sriwijaya dalam peningkatan kebersihan lingkungan menghimbau seluruh masyarakat maupun pedagang yang berjualan kebutuhan pokok untuk selalu menjaga kebersihan sampah pedagang, tidak membuang sampah dialiran sungai dan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan dibantu oleh petugas kebersihan Pasar dalam memantau dan menjaga kebersihan adanya sebuah kesepakatan dari pihak PD Pasar dan pedagang untuk memberikan iuran retrebusi sebesar Rp.1.500, rupiah kepada petugas PD Pasar yang sudah membersihkan lokasi perdagangan mereka.⁴⁵

⁴⁴ Ronal Watrianthos et al., *Kewirausahaan dan Strategi Bisnis*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020). Hal. 125

⁴⁵ Anggara, B., Idris, A., & Hasanah, N. (2019). *Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Berau*. EJournal Ilmu Pemerintahan, 7(2).

PD Pasar Restu Sriwijaya bukan hanya memantau dan menghimbau masyarakat dan pedagang untuk menjaga kebersihan di area Pasar petugas PD Pasar ikut serta membersihkan sampah pedagang yang masih tersisa di stand pasar. Ditetapkan adanya sebuah iuran yang disepakati Pedagang Pasar Sriwijaya dan Petugas kebersihan PD Pasar Restu Sriwijaya memberikan iuran untuk petugas PD Pasar dalam menjaga kebersihan Pasar dan membuang sampah hasil penjualan sayur ketempat pembuangan sampah yang sudah tersedia.⁴⁶

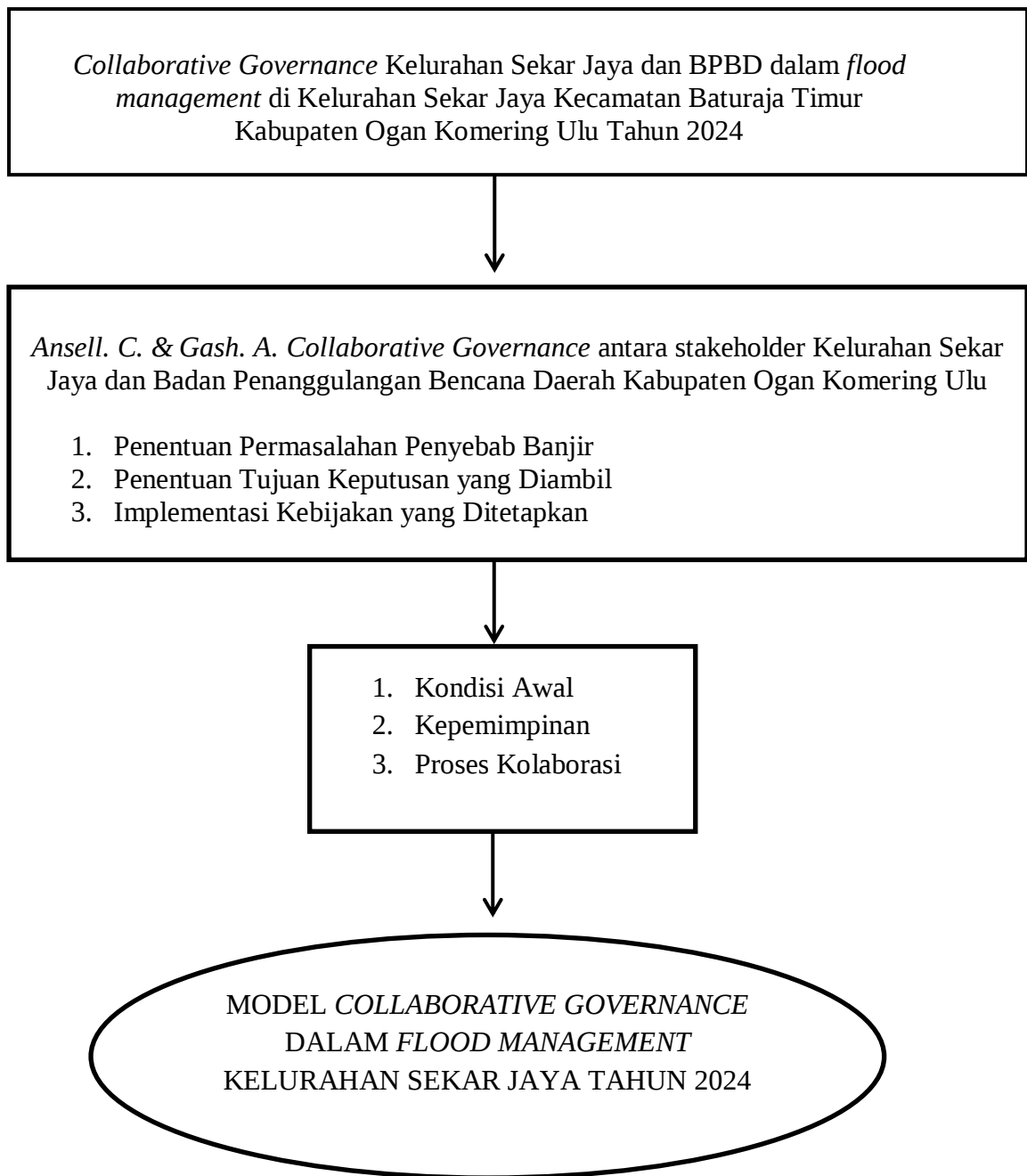
Upaya menghimbau masyarakat adakalanya masih ada oknum yang membuang sampah dialiran sungai, penulis merancang sebuah kerangka pikir yang di ungkap dalam alur permasalahan, penentuan ujuan , dan keputusan dari para stekholders melalui *collaborative governance* Kelurahan Sekar Jaya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam *Flood Management* Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.⁴⁷

Masyarakat hendaknya menjaga kebersihan bahwa satu sampah plastik sangat lama dalam proses penghancuran, pentingnya masyarakat yang menjaga dan membuang sampah pada tempat pembuangan sampah sudah disediakan. Menjaga lingkungan bukan hanya petugas kebersihan saja, masyarakat juga memiliki peran penting dan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya masyarakat yang bermukim disekitaran aliran sungai Kelurahan Sekar Jaya.

⁴⁶ Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Yogyakarta

⁴⁷ Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. In LP2M UST Jogja (Issue March).

Lingkungan menjadi faktor utama terjadinya banjir kurangnya resapan air dan banyaknya sampah yang menyumbat aliran sungai menjadi faktor terjadinya banjir di Kelurahan Sekar Jaya. Faktor cuaca yang ekstrim menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Pentingnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam optimalisasi menjaga kebersihan dan membuang sampah yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Sekar Jaya.



Bagan 2.1 Kerangka Pikir